

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu jenis usaha yang ada di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau biasa disingkat dengan UMKM. UMKM merupakan sebuah kumpulan usaha yang berjumlah sangat besar dalam perekonomian. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2014-2016, UMKM berjumlah lebih dari 57.900.000 unit serta ditaksir akan terus bertambah. UMKM juga mempunyai keunggulan yang telah terbukti, dimulai dari kemampuan penyerapan tenaga kerja, tahan dari goncangan krisis ekonomi, serta memiliki peranan penting pada perekonomian ASEAN. Kehadiran UMKM di Indonesia terbukti dapat menembus pasar global. Karena kejadian ini, UMKM terus mengalami perkembangan di Indonesia. (Kusumawardani, 2019).

Perkembangan serta pertumbuhan UMKM juga sangat baik setiap tahunnya. Hampir semua pemerintah sangat memperhatikan dan mementingkan penguatan UMKM serta memberikan perhatian yang lebih sungguh-sungguh terhadap sektor usaha ini. Hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mementingkan untuk menggunakan teknologi daripada tenaga manusia, dan UMKM ini merupakan tulang punggung pasokan tenaga kerja. UMKM berpotensi menstabilkan perekonomian dan menjadi dinamisator. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat perlu untuk memperhatikan UMKM karena meningkatkan kinerja,

produktifitas dan mencari nafkah di sekitar perusahaan besar dalam hal tenaga kerja yang produktif. UMKM dapat mendukung perusahaan besar, misalnya dalam hal penyediaan bahan baku, suku cadang, serta bahan pendukung yang lain. UMKM juga dapat memimpin perusahaan besar dalam pendistribusian serta penjualan produk dari perusahaan besar kepada konsumen. (Sarfiyah, Atmaja, & Verawati, 2019).

Pada perekonomian Indonesia, peran UMKM dapat dilihat dari posisinya di dunia bisnis saat ini. Kehadiran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat dominan dan penting. Pentingnya UMKM di Indonesia ditunjukkan oleh tiga indikator, yaitu pertama, setiap sektor ekonomi terdapat banyak industri. Kedua, potensi besar UMKM untuk menyerap tenaga kerja. Ketiga, terbentuknya Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan sumbangsih UMKM. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki cukup banyak UMKM dibandingkan perusahaan lain di Indonesia. Hal ini karena UMKM memiliki keunggulan yang tidak dimiliki pelaku usaha, yakni produk lokal serta tenaga kerja yang relatif tinggi. (D. Wijaya, 2018).

Kontribusi yang diberikan oleh UMKM untuk perekonomian juga tidak kalah penting. Hal yang lain menunjukkan bahwa keberadaan UMKM akan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia untuk mempengaruhi perekonomian nasional dan daerah serta bertahan dari krisis keuangan yang melanda hampir semua negara. (Purba, 2019). Peranan penting

UKM bagi pembangunan ekonomi negara tidak bisa dipungkiri. Pada sebagian negara, UKM merupakan mayoritas perusahaan, perdagangan, serta pendapatan ekspor. UKM juga dipandang sebagai sumber penghasilan serta terobosan yang penting. (Frilisia & Wirajaya, 2018).

Mengingat pentingnya implementasi akuntansi pada UMKM, IAI yang merupakan lembaga profesi dan badan penyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berusaha untuk mengembangkan standar akuntansi sesuai karakteristik UMKM melalui Dewan Standar Akuntansi. Pada tahun 2009, DSAK sudah menyetujui SAK ETAP, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2011. SAK ETAP dijadikan sebagai standar akuntansi yang dipergunakan oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat umum. SAK ETAP dirancang untuk memungkinkan UKM menyusun laporan keuangan tentang pembiayaan serta pengembangan usaha. Akan tetapi, penerapan standar ini dianggap sulit bagi UMKM, maka IAI menyediakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Menengah (SAK EMKM) yang disetujui pada tanggal 24 Oktober 2016 serta berlaku pada 1 Januari 2018. (Hetika & Mahmudah, 2017).

PSAK No.27 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27) merupakan panduan untuk koperasi serta UMKM untuk membuat pembukuan sebelum SAK ETAP diterbitkan. Akhirnya, DSAK dengan PSAK No.27 melakukan pencabutan PSAK No. 27 terkait akuntansi koperasi. Hal ini dilihat sebagai efek pemusatan IFRS membuat SAK berbasis industri dicabut. Hal tersebut dikarenakan telah

diatur dalam SAK yang lain. Dengan adanya penerbitan SAK ETAP dalam bentuk sederhana dari PSAK No. 27 diharapkan untuk mampu melakukan pembukuan dalam penyajian laporan keuangan yang lebih bermakna. Hal ini memungkinkan pelaku UMKM untuk tetap berada di puncak kemajuan bisnis serta membuat keputusan yang tepat berdasarkan laporan keuangan. (Aini, 2017).

SAK ETAP adalah standar keuangan yang dijadikan sebagai pedoman untuk membantu UMKM dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan secara terperinci. Pelaporan keuangan diperuntukkan kepada pihak dalam dan luar perusahaan. Untuk pihak dalam perusahaan, akan mempermudah manajemen menghitung untung rugi dari kegiatan usaha serta mengetahui secara rinci pemasukan dan pengeluaran, sedangkan untuk pihak luar perusahaan, akan mempermudah para investor untuk membiayai pengusaha UMKM. (Kusumawardani, 2019).

Penerapan PSAK ETAP dijadikan sebagai terobosan dan kemajuan untuk mengembangkan implementasi akuntansi di kalangan UMKM. SAK ETAP merupakan prinsip, tata cara, metode, atau aturan yang diberlakukan dalam menyusun laporan keuangan pada entitas tanpa akuntan publik. Entitas tanpa pertanggungjawaban umum adalah perusahaan yang belum terdaftar di bursa pasar serta bukan termasuk lembaga keuangan. SAK ETAP termasuk salah satu dari tiga pilar SAK di Indonesia berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAS). SAK

ETAP memiliki karakteristik yang terdiri dari standar yang berdiri sendiri, berarti tidak tergantung pada GAAP, hanya umum transaksi yang dilakukan oleh UMKM, kebanyakan menggunakan konsep *historical boarding*, yakni pengaturan yang lebih standar sederhana daripada GAAP serta tidak ada perubahan dalam beberapa tahun. (Hendrian & Hadiwidjaja, 2016).

Akan tetapi, hingga kini masih banyak UMKM mempunyai banyak tantangan untuk diatasi, termasuk terbatasnya akses ke sumber kredit atau pendanaan bank, kelemahan organisasi, manajemen, maupun penguasaan teknologi. Tidak sedikit UMKM yang mengalami kebangkrutan karena tidak mampu melanjutkan bisnisnya serta kekurangan modal untuk meneruskan usahanya. Sementara itu, banyak UMKM yang mencoba mengajukan pinjaman untuk modal usaha ke Bank tetapi ditolak oleh pihak Bank dikarenakan tidak memiliki laporan keuangan yang dijadikan sebagai sebuah persyaratan yang harus terpenuhi untuk mengajukan pinjaman dari Bank. (Nandani dan Mahendra, 2016).

Sebagai langkah pertama dalam pengimplementasian SAK ETAP secara menyeluruh, diperlukan sosialisasi atau pelatihan untuk UMKM supaya sadar serta paham akan tujuan maupun cara pengimplementasian standar. IAI melakukan proses sosialisasi yang merupakan pengumuman penentuan serta peresmian SAK ETAP melalui berbagai media cetak, penerbitan buku-buku SAK untuk dijual dan didistribusikan, sarana komunikasi lainnya, seperti mengadakan

pelatihan, kursus maupun seminar kepada para pemakai SAK ETAP dan pemangku kepentingan lainnya.

SAK ETAP ditujukan bagi organisasi tanpa tanggung jawab umum yang signifikan serta membuat laporan keuangan yang bertujuan umum kepada pihak luar perusahaan. (Bahri, 2016). Berdasarkan SAK ETAP, penyusunan laporan keuangan lebih sederhana serta mudah dipahami dibandingkan PSAK umum. Namun, tidak sedikit UMKM merasa kesulitan pada saat melakukan pencatatan yang tidak sesuai dengan SAK ETAP.

Kesulitan yang dialami para pelaku UMKM dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, yakni (1) latar belakang pendidikan yang masih rendah membuat para pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan berdasarkan SAK ETAP, (2) penerapan SAK ETAP belum dilakukan oleh sebagian besar UMKM karena merasa masih pemula ketika ingin membuka usaha, (3) serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan SAK ETAP dari pihak yang terkait, sehingga pelaku UMKM tidak memahami standar yang harus dijadikan sebagai pedoman pada saat menyusun laporan keuangan.

Menurut (Banjarnahor & Devi, 2018) pada saat proses perkembangan UKM, ada beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya sulit memperoleh tambahan dana dari pihak perbankan. Hal tersebut dikarenakan pemahaman yang masih kurang mengenai pentingnya laporan keuangan. Faktor dari kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pelaporan keuangan yaitu rendahnya

pendidikan serta persepsi usaha kecil menengah. Berbeda dengan (Sularsih & Wibisono, 2021) yang menyatakan bahwa pengimplementasian standar akuntansi keuangan dapat memudahkan pihak perbankan dalam mengakses permodalan sebagai indikator kualitas pelaporan keuangan. (Muchlis, 2021) juga menyatakan bahwa menyusun laporan keuangan berdasarkan dengan standar, UKM akan mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kebutuhan permodalan, serta merupakan bentuk pertanggungjawaban bagi pihak pemberi pinjaman. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP mampu mencerminkan pemisahan keuangan perusahaan dan uang pribadi.

Kota Batam terkenal dengan industri dan perdagangannya. Sebagai kawasan yang strategis untuk membuka usaha, banyak pelaku usaha yang mengambil peluang untuk memulai bisnis mereka sendiri. Hal ini dikarenakan ada banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Menurut data yang didapat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ada sebanyak 694 pelaku usaha mikro binaan yang sudah terdaftar pada periode 2017 sampai 2021. Data tersebut disajikan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Usaha Mikro Binaan Kota Batam

Tahun	Jumlah Usaha Mikro Binaan
2017	166
2018	94
2019	63
2020	232
2021 (per Oktober)	139
Total	694

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Para pelaku usaha di Kota Batam sekarang ini tengah menghadapi banyak permasalahan. Diantaranya yakni pelaku UMKM kesulitan untuk menggunakan pembukuan dalam aktivitas usahanya karena tidak ada pedoman yang bisa digunakan sebagai acuan untuk mempelajari cara pengelolaan keuangan. UMKM melibatkan banyak transaksi, seperti perdagangan saling bertukar barang tetapi para pengusaha tidak melakukan pencatatan pada saat terjadinya transaksi karena mendapatkan panduan di buku. Jika ada banyak transaksi yang sama serta tidak dicatat, maka akan berdampak yang buruk bagi kinerja perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi SAK ETAP pada UMKM yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan SAK ETAP pada UMKM di Kota Batam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Tidak tersedianya informasi mengenai kondisi perusahaan karena kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh pelaku UMKM mengenai pembukuan;
2. Adanya peraturan yang mewajibkan UMKM melakukan pembukuan;
3. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai SAK ETAP yang diberikan oleh pihak eksternal mengakibatkan minimnya perapan SAK ETAP pada UMKM.
4. Kegagalan pelaku UMKM pada saat mengajukan kredit ke Bank karena tidak adanya laporan keuangan untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan pinjaman;
5. Tidak adanya pedoman yang dijadikan referensi sehingga pelaku UMKM merasa kesulitan dalam penggunaan akuntansi.

1.3 Batasan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah di atas, maka diperlukan batasan masalah supaya penelitian lebih terarah. Karena terbatasnya waktu serta pengetahuan yang dimiliki peneliti, maka penelitian ini hanya berfokus pada:

1. Penerapan SAK ETAP pada usaha mikro di Kota Batam.
2. Usaha mikro yang beroperasi di Kota Batam tahun 2017-2021.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah latar belakang pendidikan usaha mikro Kota Batam mempengaruhi penerapan SAK ETAP?
2. Apakah umur usaha mempengaruhi penerapan SAK ETAP?
3. Apakah sosialisasi dan pelatihan mempengaruhi penerapan SAK ETAP?
4. Apakah latar belakang pendidikan, umur usaha, serta sosialisasi dan pelatihan secara simultan mempengaruhi penerapan SAK ETAP?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk:

1. Mengetahui apakah latar belakang pendidikan usaha mikro Kota Batam mempengaruhi penerapan SAK ETAP;
2. Mengetahui apakah umur usaha mempengaruhi penerapan SAK ETAP;
3. Mengetahui apakah sosialisasi dan pelatihan mempengaruhi penerapan SAK ETAP;
4. Mengetahui apakah latar belakang pendidikan, umur usaha, serta sosialisasi dan pelatihan secara simultan mempengaruhi penerapan SAK ETAP.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yakni:

1. Kepada Penulis

Untuk membuktikan apakah variabel latar belakang pendidikan, umur usaha, serta sosialisasi dan pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP pada UMKM.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memperluas pengetahuan serta dijadikan referensi untuk melakukan penelitian berikutnya yang lebih detail mengenai SAK ETAP.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yakni:

1. Kepada Pihak Akademis

Diharapkan bisa memberikan informasi mengenai sejauh mana penerapan SAK ETAP oleh para UMKM serta menjadi referensi perpustakaan untuk mahasiswa lain dalam melakukan penelitian berikutnya.

2. Kepada Pihak UMKM

Diharapkan mampu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melakukan pembukuan dan laporan keuangan, membantu menyosialisasikan SAK ETAP, serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SAK ETAP.